

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada penelitian ini, *grand theory* yang menjadi landasan kajian teori yang digunakan adalah Ilmu Pertahanan Negara. Ekonomi Pertahanan merupakan *middle range theory*; sedangkan Anggaran Pertahanan, Pengadaan Alat Pertahanan, Tugas Tentara Nasional Indonesia, dan Ancaman Non Militer merupakan *applied theory*. Selain didasarkan pada *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang relevan dalam kajian pengaruh anggaran pertahanan dan pengadaan alat pertahanan terhadap tugas Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman non militer.

2.1.1 Grand Theory

Grand theory adalah teori utama atau teori makro yang terhubung terhadap keseluruhan teori dan variabel dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengambil *grand theory* kedaulatan negara.

2.1.1.1 Ilmu Pertahanan Negara

Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara mengandung banyak nilai-nilai aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan secara fundamental yang bernilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan (Kaelan, 2014). Tujuan Negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 menjadi representasi bahwa ilmu pertahanan bersumber bangsa dan negara itu sendiri.

Ilmu pertahanan merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tentang seluruh aspek yang berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional

yang melekat pada tujuan penyelenggaraan negara. Urgensi dari ilmu pertahanan itu sendiri adalah adanya suatu entitas yang disebut negara (*state*) dan kebutuhan mempertahankan diri dari berbagai ancaman. Ilmu pertahanan bersifat universal dan telah menjadi kebutuhan tidak hanya bagi militer saja, namun juga untuk kalangan sipil karena ancaman yang ada memasuki seluruh dimensi kehidupan berbangsa (Gumilar, 2015).

Lingkup bahasan ilmu pertahanan jauh lebih luas dibandingkan soal seni dan ilmu perang. Bukan pula membahas hanya membahas strategi kemiliteran ataupun penggunaan senjata oleh angkatan bersenjata. Ilmu pertahanan adalah suatu ilmu tentang bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional bukan hanya pada saat damai saja, namun juga saat perang dan saat masa setelah perang. Hal ini dilakukan guna menghadapi segala bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam negeri, baik itu bersifat ancaman militer atau non-militer dalam menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam mewujudkan keamanan nasional (Supriyatno, 2014).

Pertahanan dalam dunia akademisi merupakan bahan kajian yang sangat menarik, sebab pertahanan menjadi spektrum dari segala disiplin ilmu dan pemecahan masalah bidang multidimensional. Sesuai termaktub di dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia(2015) hakikat pertahanan merupakan bentuk pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan dalam menjaga dan mempertahankan kedamaian negara Republik Indonesia. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Semesta dalam menghadapi setiap bentuk ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Sistem Pertahanan

Semesta dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama, serta segenap sumber daya nasional lainnya sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan, dalam menghadapi ancaman nirmiliter (non militer), Sistem Pertahanan Semesta menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dan didukung oleh unsur lain dari kekuatan bangsa (Supandi, 2019). Dengan demikian dalam menghadapi ancaman nir militer (non militer), TNI menjadi salah satu unsur pendukung.

Penguatan bidang pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan juga menjadi sangat strategis. Disebut negara maritim terbesar dunia, Indonesia memiliki daya tawar tinggi dalam membangun kekuatan pertahanan di wilayah-wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah memiliki kebijakan terkait agenda prioritas PMD (poros maritim dunia). Adapun lima sasaran strategis meliputi: 1) Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman; 2) Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan, dan keamanan wilayah dirgantara; 3) Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif; 4) Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing; 5) Mewujudkan negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara.

Konteks bidang pertahanan negara-negara dunia telah mengalami perkembangan yang pesat mengikuti berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi-komunikasi. Konsep maupun teknologi pertahanan harus dibangun secara masif untuk mengimbangi kekuatan militer dunia mengingat konstelasi geopolitik dan isu-isu strategis yang terus berkembang dinamis, bahkan menyasar bidang multidimensional. Sedangkan konsep ilmu pertahanan pada penelitian ini adalah bagaimana pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dapat mengolah dan

menempatkan sumber daya nasional yang tepat untuk menghadapi segala bentuk ancaman.

2.1.2 Middle Range Theory

Middle range theory adalah teori-teori yang digunakan untuk menghubungkan antara hipotesis-hipotesis terbatas dari studi empiris dan *grand theory* yang abstrak. Pada penelitian ini menggunakan *middle range theory* ekonomi pertahanan.

2.1.2.1 Ekonomi Pertahanan

Istilah ekonomi pertahanan berkembang sesuai kebaruan ancaman dan perkembangan politik. Selama Perang Dingin dan beberapa tahun setelahnya, ekonomi pertahanan didefinisikan sebagai studi ekonomi untuk pertahanan, perlucutan senjata, perubahan, dan perdamaian. Setelah era Perang Dingin, ekonomi pertahanan fokus pada ekonomi untuk perang dan perdamaian, termasuk studi tentang perang dan konflik, baik konvensional maupun non konvensional. Contohnya termasuk studi ekonomi tentang perang saudara, revolusi dan terorisme.

Yusgiantoro (2014) menjelaskan, ekonomi pertahanan merupakan cabang ilmu yang menerapkan ilmu ekonomi pada masalah pertahanan negara. Seperti halnya ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi politik, maupun ekonomi lingkungan, ekonomi pertahanan mengaplikasikan ilmu ekonomi yang sudah digunakan jauh ke dalam bidang-bidang tertentu, dalam hal ini pertahanan negara.

Ekonomi Pertahanan menurut Supandi (2019) adalah studi ekonomi yang mengkaji berbagai fenomena berkaitan dengan pengelolaan potensi dan pemanfaatan sumber daya nasional seperti Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Buatan (SDB), Sarana dan Prasarana untuk kepentingan pertahanan negara dalam upaya mewujudkan kemakmuran ekonomi rakyat dan keamanan nasional.

Michael (1990) menjelaskan bahwa isu-isu yang terkait dengan ekonomi pertahanan, antara lain tingkat belanja pertahanan, dampak pengeluaran pertahanan terhadap produk dan lapangan kerja di dalam dan luar negeri, pertimbangan mengenai eksistensi dan besaran lingkup pertahanan, kaitan antara belanja pertahanan dengan perubahan teknologi, dan implikasi belanja pertahanan dalam lingkup pertahanan dalam rangka kestabilan atau ketidakstabilan internasional.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Sandler (2000) mengatakan bidang ekonomi pertahanan (*defense economics*) merupakan studi tentang ekonomi berbasis pertahanan yang mengkaji berbagai masalah pertahanan menggunakan pendekatan teori ekonomi mikro dan ekonomi makro seperti optimasi statis dan dinamis, teori-teori pertumbuhan, distribusi, perbandingan data statistik dan ekonometrika (penggunaan statistika model ekonomi). Sedangkan pelaku-pelaku dalam studi ini antara lain menteri pertahanan, birokrat, kontraktor pertahanan, anggota parlemen, bangsa-bangsa yang bersekutu, para gerilyawan, teroris dan pemberontak.

Merujuk kepada Hartley, *et al.* (1995), secara makroekonomi, ekonomi pertahanan adalah suatu studi alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi yang diaplikasikan pada topik-topik yang berhubungan dengan pertahanan. Ekonomi pertahanan melingkup berbagai sub bidang ekonomi, termasuk ekonomi sektor publik (barang publik, efek eksternalitas yang diperoleh suatu sektor ekonomi dari kaitannya dengan sektor ekonomi lainnya, pengukuran output), ekonomi industri (studi basis industri, pengadaan, riset dan pengembangan, kebijakan industri – kolaborasi, produksi berlisensi– dalam industri pertahanan), ekonomi tenaga kerja, ekonomi internasional, pilihan publik, serta pertumbuhan ekonomi dan makroekonomi lainnya.

Ekonomi pertahanan memiliki dua dimensi, yaitu makroekonomi dan mikroekonomi. Secara makroekonomi, ekonomi pertahanan meliputi

kajian atas pengaruh pengeluaran/belanja pertahanan, baik secara domestik maupun internasional, terhadap variabel-variabel makroekonomi, seperti kesempatan kerja, output, dan pertumbuhan. Secara mikroekonomi, ekonomi pertahanan meliputi analisis basis industri pertahanan, program kolaborasi, offset, pembentukan harga dan profitabilitas dari kontrak militer, serta regulasi bagi kontraktor pertahanan.

Kerangka nasional dan universal mengenai pertahanan dan keamanan sangat erat dengan dimensi apapun secara nasional yang harus diusahakan serius. Dalam konteks yang lebih luas banyak hal yang dapat dikaitkan dengan pertahanan, diantaranya pertahanan ekonomi, pertahanan sosial, pertahanan budaya, dan pertahanan politik. Mengaca pada fakta yang ada ditengah ketidakpastian situasi kondisi perekonomian yang fluktuatif, maka ekonomi pertahanan menjawab pada dasar dalam pengambilan keputusan strategik secara fiskal maupun moneter. Dosen Universitas Pertahanan Laksdya TNI (Purn) Agus Setyaji dalam diskusi virtual bertema “Strategi Dibalik kebijakan Alokasi Anggaran Pertahanan” di Jakarta pada Selasa, 7 Juli 2020 mengatakan bahwa ekonomi pertahanan merupakan ilmu untuk mempelajari isu-isu terkait pertahanan, perencanaan, pembangunan kekuatan termasuk pelucutan senjata dan perdamaian dunia. Menurut beliau banyak hal tercakup dalam ekonomi pertahanan, diantaranya pencegahan dan penghindaran perang, interaksi strategis dalam hal perlombaan senjata, serta pembentukan aliansi dan alokasi sumber daya dan perilaku.

Keamanan merupakan hasil dari pertahanan, disini ditafsirkan bahwa kaitan ekonomi pertahanan dengan aspek kehidupan adalah pengupayaan secara masif yang dilakukan pada sektor ekonomi dalam hal optimalisasi kondisi perekonomian nasional, membuka kerjasama internasional baik dalam hal kemiliteran maupun non militer, dan kerjasama untuk pemerataan pembangunan. Sasaran akhir dari pengamalan ekonomi pertahanan yakni mampu berpikir serta bertindak

strategis dalam mensinergikan antara kesejahteraan masyarakat dan keamanan nasional.

2.1.3 Applied Theory

Applied theory adalah teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan antara konsep-konsep sebuah penelitian. Teori ini disebut juga teori mikro yang menjadi dasar dalam pencarian indikator-indikator penelitian. Pada penelitian ini menggunakan *applied theory* anggaran pertahanan, pengadaan alat pertahanan, tugas Tentara Nasional Indonesia, dan ancaman non militer.

2.1.3.1 Anggaran Pertahanan

Anggaran pertahanan pada dasarnya untuk biaya pembayaran gaji personel pertahanan, biaya pemeliharaan dan perawatan serta biaya sarana pertahanan, dalam kurun waktu tertentu. Anggaran pertahanan selalu terkait dengan kegiatan yang dilakukan dalam lingkup pertahanan dan keamanan, serta kegiatan yang dilakukan dalam menanggulangi dinamika ancaman yang dihadapi suatu negara. (Yusgiantoro, 2015).

Anggaran pertahanan merupakan suatu komitmen negara untuk menyediakan sumber dana untuk tujuan–tujuan mengamankan dan meningkatkan keamanan negara dari ancaman militer, apakah fisik (*riii*) atau psikologis (dalam tataran persepsi), internal atau eksternal. Perhatian utama anggaran pertahanan adalah penciptaan, pemeliharaan dan melengkapi angkatan bersenjata. Tujuan dari pengeluaran pertahanan adalah untuk menyediakan pertahanan militer yang kuat bagi negara beserta teritorinya, dan keamanan bagi para warga negaranya (Kennedy, 2017).

Chrisnandi (2007) menyebutkan bahwa salah satu unsur utama dalam rumusan strategi pertahanan adalah rumusan mengenai jumlah anggaran belanja pertahanan negara. Selain postur dan struktur pertahanan, komponen anggaran menjadi sangat vital karena anggaran

adalah salah satu kunci dari implementasi total kekuatan negara. Menurut Supandi (2019), anggaran pertahanan atau pengeluaran militer diartikan sebagai jumlah sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh suatu negara atau entitas lainnya untuk meningkatkan dan mempertahankan angkatan bersenjata. Pengeluaran militer seringkali mencerminkan seberapa kuat pertahanan suatu negara terhadap ancaman dari pihak lain.

Pengeluaran militer merupakan sebuah *input* dalam suatu sistem pertahanan keamanan dimana *output* yang akan dicapai adalah kinerja dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional, memenangkan peperangan, serta memiliki kemampuan untuk meredam berbagai ancaman (Rivai, 2021). Namun demikian, untuk dapat mencapai *output* yang diinginkan, sangat tergantung pada berbagai faktor lain yang tidak dapat nilai dengan ukuran moneter atau uang.

Pada tahun 2021 alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan yakni sebesar Rp137,29 triliun atau meningkat 16,44 persen dari tahun sebelumnya. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan bidang pertahanan, melalui pelaksanaan program-program yang dalam penelitian ini difokuskan pada program pembinaan sumber daya pertahanan dan program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.

Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik yang mana dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu (Thoha, 2002). Sedangkan pembinaan sumber daya manusia adalah kegiatan yang dilakukan terhadap keberadaan sumber daya manusia pada sebuah organisasi agar lebih memiliki daya guna dan berhasil guna dalam melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta seefektif mungkin. Pembinaan dapat dilakukan diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas (Thomassawa, 2019).

Menurut Supandi (2020), pembinaansumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan harus dirumuskan secara jelas agar mendapatkan dampak dan manfaat positif. Hal tersebut dilakukan melalui cara sistematis yang dapat memberikan deskripsi serta mengkondisikan pengembangan aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik tenaga kerja (SDM) terhadap tugas dan pekerjaannya. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur upaya pembinaan sumber daya manusiayang hendak dicapai melalui pendidikan dan pelatihan meliputi:

- a. Peningkatan keahlian kerja.
- b. Pengurangan keterlambatan kerja, kemangkiran, serta perpindahan tenaga kerja.
- c. Pengurangan timbulnya kecelakaan dalam bekerja, dan peningkatan pemeliharaan terhadap alat-alat kerja.
- d. Peningkatan produktivitas kerja.
- e. Peningkatan kecakapan kerja.
- f. Peningkatan rasa tanggungjawab.

Selain pada pembinaan sumber daya manusia, upaya pengembangan postur dan struktur pertahanan juga dilakukan dengan peningkatan kesejahteraan prajurit dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit. Menurut buku Laporan Capaian Kinerja Deputy Koordinator Bidang Pertahanan Negara Tahun 2017 Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan hal tersebut dilakukan melalui strategi meliputi:

- a. Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas latihan prajurit TNI.
- c. Peningkatan fasilitas kesehatan prajurit TNI.

Berdasarkan penjabaran di atas disimpulkan bahwa anggaran pertahanan merupakan anggaran negara yang digunakan untuk program-program pertahanan seperti program pembinaan sumber daya manusia yang direpresentasikan melalui pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertahananserta program kesejahteraan prajurit dengan indikator-indikatornya adalah peningkatan keahlian kerja; peningkatan

produktivitas kerja; peningkatan kecakapan kerja; peningkatan rasa tanggungjawab; pengurangan keterlambatan kerja, kemangkiran, perpindahan tenaga kerja; pengurangan timbulnya kecelakaan dalam bekerja dan peningkatan pemeliharaan terhadap alat-alat kerja; peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit; peningkatan kualitas dan kuantitas latihan prajurit TNI; dan peningkatan fasilitas kesehatan prajurit TNI.

2.1.3.2 Pengadaan Alat Pertahanan

Pengadaan alat pertahanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 2 dijelaskan, pengadaan alutsista TNI adalah kegiatan untuk memperoleh alutsista TNI yang pentahapannya didahului dari perencanaan kebutuhan sampai diterimanya alutsista TNI yang berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan dalam ayat 25 dijelaskan, pengguna alutsista TNI adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau Jasa Milik Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Pengadaan alat pertahanan tidak terlepas dari program *minimum essential force* (MEF) seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, serta *Strategic Defence Review* (SDR) telah dirumuskan dan ditetapkan tahun 2009 berisi pokok-pokok pikiran dan rekomendasi langkah-langkah strategis dalam mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum sesuai dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara.

Pembangunan MEF TNI telah direncanakan dalam jangka panjang dengan mengacu pada aspek modernisasi alutsista, pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi maupun pemenuhan sarana prasarana. Perencanaan pembangunan itu pun telah didukung dengan kemampuan industri pertahanan nasional dan profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan prajurit (Suroso, 2021).

Pembangunan MEF diselaraskan dengan sumber daya yang terbatas dengan merevitalisasi industri pertahanan, namun diharapkan tetap mampu mengatasi ancaman aktual sebagai skala prioritas tanpa mengesampingkan ancaman potensial dalam kerangka TNI mampu melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Hal tersebut diselaraskan untuk memberikan wujud nyata pengembangan kekuatan Trimatra Terpadu yang merupakan bagian dari rencana dasar MEF, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap melalui empat strategi pengembangan MEF, yaitu rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan. Strategi tersebut juga dilengkapi dengan kebijakan pengembangan personel TNI yang menggunakan prinsip *zero growth policy* dan *right sizing* serta mempertimbangkan aspek organisasi. Prinsip tersebut dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas TNI yang diarahkan untuk mewujudkan suatu komposisi personel TNI yang tangguh dan handal.

Dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP) kekuatan komponen utama yang dibangun dapat membantu komponen nasional lainnya. Untuk itu, strategi pengembangan MEF khususnya bidang pengadaan alutsista memiliki dampak ganda selain proses alih teknologi. Alih teknologi merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Pengadaan alutsista dan pendukung alutsista didasarkan pada pertimbangan ancaman aktual sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2010 kegunaan alutsista untuk tugas operasional yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu: kemampuan, kekuatan, dan gelar untuk mempertahankan negara dari ancaman *flash point* dan terpusat. Pengadaan alutsista dilakukan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pertahanan yang bertujuan untuk mengembangkan industri pertahanan yang mandiri dan mampu melindungi kedaulatan wilayah NKRI.

Program pengadaan pertahanan membutuhkan investasi yang besar, sehingga harus benar-benar berpedoman pada perolehan kematangan teknologi dan produksi yang diproyeksikan mencapai kemandirian alat pertahanan di tahun 2025. Menurut Sahabuddin (2020), kemandirian diciptakan melalui beberapa hal pencapaian indikator yang meliputi:

- a. Sumber daya manusia
Dalam hal ini diharapkan mampu mendapatkan *engineer* aktif dalam rancang bangun, pengembangan, dan *upgrading* kelangsungan hidup perusahaan; penguasaan dan peningkatan *engineer* dalam teknologi inti.
- b. Teknologi
Teknologi direpresentasikan melalui penguasaan integrasi sistem dan penguasaan integrasi senjata.
- c. Produksi
Produksi diharapkan dapat menciptakan penguasaan teknologi *advance* material dan penguasaan proses produksi teknologi tinggi.

Berdasarkan definisi di atas disimpulkan bahwa pengadaan alat pertahanan adalah bagian standar untuk memenuhi kekuatan minimal pertahanan Indonesia yang dilaksanakan melalui kebijakan opsional seperti pengadaan peralatan pertahanan dalam menguatkan sistem

pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman. Pengadaan yang diproyeksikan menuju kemandirian alat pertahanan tahun 2025 dapat dicapai melalui indikator sumber daya manusia, teknologi, dan produksi.

2.1.3.3 Tugas Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI).

Pada hakekatnya, penyelenggaraan pertahanan negara merupakan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan potensi dan kekuatan pertahanan negara untuk menangkal dan menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa secara sistemik. Dalam kaitan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidang pertahanan negara yang merupakan instrumen penuntun dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pada tataran politik, kebijakan di bidang pertahanan negara diatur dalam dokumen Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang memberikan petunjuk garis besar bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan fungsi pertahanan negara (Sisriadi, 2016).

Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa pembangunan postur pertahanan negara dilaksanakan dengan mengintegrasikan pembangunan postur pertahanan militer dan pembangunan postur pertahanan nirmiliter. Pembangunan postur pertahanan negara merupakan komponen integral dari pembangunan nasional yang sinergis dan searah dengan pembangunan bidang lainnya,

demikian terwujudnya pencapaian Visi, Misi dan Nawacita pemerintah dalam tatanan pembangunan nasional (www.kemhan.go.id).

Perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional berdampak bagi perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu arah kebijakan pembangunan postur TNI dipengaruhi oleh arah kebijakan umum pertahanan negara yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan pengaruh perkembangan lingkungan strategis, potensi ancaman, serta perkiraan kemampuan keuangan negara (Harsono, 2009).

Pemerintah saat ini telah berkomitmen dalam mengalokasikan anggaran pertahanan dan skema anggaran yang realistis guna menjamin kesinambungan rencana pembangunan pertahanan jangka panjang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Termasuk di dalamnya yakni merumuskan kebijakan (Politik) penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta alutsistanya sebagai komponen utama yang didukung oleh Sumber Daya Nasional lain, sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Pertahanan negara yang handal, mampu mendukung kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD), serta mampu untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan serta mengamankan kepentingan nasional dari evolusi potensi dan hakekat ancaman dan tantangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang profesional, tangguh dan berwawasan bela negara, didukung dengan alat dan infrastruktur pertahanan yang handal, memadai dan mandiri.

Menghadapi ancaman non militer dibutuhkan postur pertahanan non militer yang terdiri atas Unsur Utama dan Unsur Lain Kekuatan Bangsa yang disusun dan ditata oleh K/L di luar bidang pertahanan. Penataan Unsur Utama dan Unsur Lain Kekuatan Bangsa secara terpadu

dapat berperan sesuai dengan fungsinya pada pertahanan nirmiliter. Sebagai sumber daya manusia pertahanan, TNI merupakan manusia unggul, artinya seseorang yang memiliki multi kecerdasan intelektual (*multiple intelligences*) dan talenta luar biasa dengan kemauan dan kemampuan superior untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang berorientasi kepada standar hasil karya yang memuaskan. Kapasitas tersebut dapat dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Supandi, 2020).

Tentara Nasional Indonesia sebagai unsur pendukung yang unggul memiliki kemampuan sosial yang diaktualisasikan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi ini diarahkan untuk menjunjung tinggi kerukunan dan hidup berdampingan secara damai, tanpa mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Kemampuan sosial ini juga menjamin keselamatan warga negara dari berbagai bencana. Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) menjelaskan bahwa perwujudan kemampuan sosial dikembangkan melalui pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, dan ketaatan terhadap hukum serta faktor-faktor yang memberikan kontribusi bagi pertahanan negara seperti peran media massa, sistem komunikasi, dan informasi publik yang dioptimalkan dalam mendukung implementasi kemampuan sosial untuk keberhasilan usaha-usaha pertahanan negara.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa postur Tentara Nasional Indonesia adalah wujud dari kekuatan militer Indonesia melalui jumlah personil, tingkat kemampuan, dan penggelaran pasukan. Salah satu kemampuan yang terdoktrin pada personel dalam menjalankan tugas dan membaaur dengan masyarakat yakni kemampuan sosial yang indikator-indikatornya meliputi program pendidikan, program kesehatan, program penanganan bencana, ketaatan terhadap hukum, peran media massa, sistem komunikasi, dan informasi publik

2.1.3.4 Ancaman Non Militer

Ancaman nirmiliter dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan disebut ancaman non militer merupakan bentuk ancaman yang menggunakan faktor-faktor non militer yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dan negara. Ancaman non militer dapat berasal dari luar negeri atau dapat bersumber dari dalam negeri. Ancaman non militer digolongkan ke dalam beberapa dimensi seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi baik pada tataran lokal, regional, maupun nasional (www.kemhan.go.id).

J. Peter Burgess dalam buku *Non-Military Security Challenges* menyatakan bahwa tantangan-tantangan yang menyangkut dinamika ancaman non militer antara lain: 1) Ketidakmanan yang bersumber dari dinamika hubungan antar individu, 2) Ketidakamanan sosietal, 3) Arus perpindahan manusia atau migrasi, 4) Perubahan iklim, 5) Sumber daya alam dan air, 6) Energi, 7) Kejahatan transnasional, 8) Perdagangan manusia, 9) Perdagangan senjata, dan 10) Kesehatan. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, para akademisi dan juga pemangku kebijakan dapat menjadikan 1) Komersialisasi keamanan, 2) Penyedia keamanan, 3) Teknologisasi keamanan, 4) Globalisasi keamanan, dan 5) Intensitas berkembangnya "*production of insecurity*" sebagai *center for gravity* dalam melihat penyelesaian masalah-masalah yang diakibatkan oleh ancaman-ancaman nonmiliter (Alfajri *et.al*, 2019).

Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan

yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan (UU RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara).

Globalisasi menurut (Nurohman, 2017) merupakan arus besar yang dihempaskan oleh banyak faktor, utamanya politik dan ekonomi dunia yang menerjang dan mempengaruhi semua sendi kehidupan dalam bernegara, berbudaya, maupun beragama. Globalisasi pada dasarnya *it's no single interpretation*. Proses dalam globalisasi membentuk pola-pola tak terkecuali ciri pergaulan global yang dirumuskan melalui ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pergeseran konflik ideologi dan politik menuju persaingan dagang, investasi, dan informasi; keseimbangan kekuatan (*balance of power*) menuju keseimbangan kepentingan (*balance of interest*).
- b. Secara struktural hubungan antar bangsa/negara berubah dari sifat ketergantungan (*dependency*) menuju saling tergantung (*inter-dependency*); hubungan bersifat primordial berubah menjadi sifat tergantung sesuai tawar-menawar (*bargaining position*).
- c. Hampir kehilangan arti operasional pada atas-batas geografi. Power negara dalam interaksinya dengan negara lain ditentukan oleh kemampuannya memanfaatkan keunggulan komparatif (*comparatif advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).
- d. Penguasaan teknologi tinggi menjadi perang persaingan antar negara. Penelitian dan pengembangan memaksa tiap negara menyediakan dana yang besar.
- e. Terciptanya budaya dunia yang cenderung mekanistik, efisien hingga nilai dan norma tidak dihargai karena secara

ekonomi dianggap tidak efisien (Maksum dan Ruhendi, 2004).

Gambaran arus globalisasi yang begitu kompleks dan sangat pesat melewati batas-batas tanpa disadari membawa isu-isu strategis yang dapat menimbulkan ancaman non militer. Hal ini tentu harus diwaspadai. Secara dinamika, sisi non militer dominan untuk menekan dan mengancam negara lain dalam memuluskan ambisi negaranya. Sebagai upaya antisipasi, sinergi dalam membangun dan menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman non militer harus dijalankan dengan baik. Aspek yang harus ditata dalam menghadapi ancaman non militer adalah peraturan perundang-undangan, manajemen, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, intelijen dituntut untuk melakukan deteksi dan cegah dini serta deteksi aksi untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks (wantimpres.go.id, 2017).

Bentuk ancaman-ancaman non militer di Indonesia yang berpotensi mengganggu kestabilan dan integrasi nasional menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) antara lain ancaman pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, keselamatan umum, dan ancaman berdimensi legislasi. Pandemi covid-19 merupakan ancaman bidang keselamatan umum tentang penyebaran virus berbahaya. Selain itu, Supandi (2020) mengatakan pandemi covid-19 juga menjadi ancaman nyata bagi sektor ekonomi yang menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi secara tajam.

Pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut salah satunya diakibatkan menambah pesatnya jumlah pengangguran pekerja formal maupun informal yang totalnya mencapai 56,7 persen (Indayani dan Hartono, 2020). Meskipun secara khusus tingginya pengangguran disebabkan oleh akibat pandemi covid-19, namun secara umum menurut Ishak (2018) pengangguran disebabkan oleh beberapa hal meliputi:

- a. Sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan yang dapat menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari

kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia.

- b. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia.
- c. Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerja.
- d. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikitnya pemerataan lapangan pekerjaan.
- e. Belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan fasilitasi maupun pelatihan untuk meningkatkan *softskill*.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa ancaman non militer merupakan ancaman terorganisir bersifat non fisik yang timbul sesuai dinamika perubahan zaman. Dalam penelitian ini pengangguran adalah ancaman non militer yang dapat dikatakan ancaman bidang ekonomi maupun sosial yang ditimbulkan oleh dampak covid-19 yang mewabah dan menyerang kondisi kesehatan secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Pengangguran dalam penelitian ini indikatornya adalah jumlah lapangan kerja sedikit, keahlian pencari kerja kurang, pencari kerja kurang akses informasi kepada penyedia kerja, lapangan kerja kurang merata, dan upaya pemerintah belum maksimal dalam hal fasilitasi serta pelatihan *softskill*.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencari beberapa penelitian yang relevan dan mendukung sehingga dapat menjadi rujukan dalam penelitian ini.

2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Joko Tri Haryanto (2017)

Penelitian berjudul “Potential Impact of Fulfilment of Minimum Essential Force (MEF) to The Regional Welfare”, bertujuan untuk menghitung dampak pemenuhan *minimum essential force* (MEF) terhadap kesejahteraan daerah khususnya di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model Interregional Input-Output (IRIO) untuk mengukur dampak perubahan nilai output, pendapatan dan penyerapan tenaga kerja sebagai dampak produksi. Hasil yang diperoleh adalah pemenuhan *minimum essential force* (MEF) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan daerah. Hal tersebut dibuktikan melalui dampak potensial dari keberadaan industri pertahanan dapat menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan. Dampak output sebesar 87,25 persen hanya dinikmati Jawa Barat, sedangkan daerah lain menikmati sekitar 12,75 persen. Sementara di Jawa Timur, industri pertahanan menopang perekonomian sebesar 93,26 persen, sedangkan terhadap daerah lain hanya 6,74 persen.

2.2.2 Penelitian yang dilakukan oleh Oana Ramona Lobont, et al (2019)

Penelitian berjudul “Correlation of Military Expenditures and Economic Growth: Lessons for Romania”, bertujuan untuk mengkaji korelasi antara kebijakan publik di bidang pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi di Romania. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Granger Causality. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan dua arah antara pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dengan efek positif berdasarkan probabilitas uji Chi-squared signifikan pada tingkat 1%. Dari segi ekonomi, hasil ini menyoroiti dampak pengeluaran militer dalam upaya penggunaan sumber daya yang efisien dalam perekonomian sektor, di tingkat nasional

yang pada akhirnya dapat memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

2.2.3 Penelitian yang dilakukan oleh Bobby Wijayanto, et al (2019)

Penelitian berjudul “Pengaruh Modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan Batalyon Bekang Terhadap Kesiapan Dukungan Logistik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat”, bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi alutsista Batalyon Bekang terhadap kesiapan dukungan logistik TNI AD di satuan Batalyon Bekang TNI AD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear berganda dengan analisis data menggunakan metode SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*). Hasil dari penelitian ini dibuktikan melalui angka korelasi 0,682 dengan syarat minimum $r = 0,202$ yang artinya berkorelasi kuat ke arah positif. Artinya bahwa modernisasi alutsista Batalyon Bekang berpengaruh positif terhadap logistik, sehingga dapat mendukung kesiapan operasional pasukan pengamanan di perbatasan yang dilaksanakan oleh TNI AD.

2.2.4 Penelitian yang dilakukan oleh Dian Shintani Nayar, et al (2020)

Penelitian berjudul “Pengaruh Kemampuan Personel Dan Kelengkapan Alat Kerja Terhadap Kesiapan Satuan Pemeliharaan Pangkalan Dinas Fasilitas Dan Konstruksi Angkatan Udara Di Jakarta”, bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemampuan personel dan kelengkapan alat kerja secara parsial dan simultan terhadap kesiapan Satharlan Disfaskonau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif kausalitas dengan desain penelitian *cross sectional* survei menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Hasil penelitian adalah kemampuan personel berpengaruh positif signifikan 18,3% dan kelengkapan alat kerja 25,4% berpengaruh positif signifikan terhadap kesiapan Satharlan Disfaskonau. Secara simultan kemampuan

personel dan kelengkapan alat kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesiapan Satharlan Disfaskonau dengan nilai signifikansi sebesar 35,1%.

2.2.5 Penelitian yang dilakukan oleh Layli Eksak Agustiana(2020)

Penelitian berjudul “Pengaruh Wabah Covid-19 Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Sektor Terdampak Di Indonesia”, bertujuan untuk mengetahui model tingkat pengangguran terbuka di Indonesia setelah terdampak pandemi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear berganda terhadap data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik. Hasil dari penelitian adalah krisis ekonomi 1986-2020 berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan koefisien determinasi 27% pada Kuartal ke-2 di 2020 menggunakan Proyeksi IMF.

2.2.6 Penelitian yang dilakukan oleh Afif Maulana Rivai (2021)

Penelitian berjudul “Pengaruh Anggaran Pertahanan, Impor Alutsista, Ekspor Alutsista, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1980-2019”, bertujuan untuk mengkaji pengaruh antara indikator pertahanan dan indikator ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), World Bank, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Periode penelitian selama 40 tahun yakni dari tahun 1980 hingga tahun 2019. Metode uji statistik pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran pertahanan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas 1%, impor alutsista berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas 3%, ekspor alutsista tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomikarena nilai probabilitas 49%, inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas 0%. Secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 69%.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama, Tahun, dan Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Haryanto, Joko Tri. (2017). "Potential Impact of Fulfilment of Minimum Essential Force (MEF) to The Regional Welfare".	Analisis model Interregional Input-Output (IRIO) untuk mengukur dampak perubahan nilai output, pendapatan dan penyerapan tenaga kerja sebagai dampak produksi.	Pemenuhan <i>minimum essential force</i> (MEF) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan daerah. Hal tersebut dibuktikan melalui dampak potensial dari keberadaan industri pertahanan dapat menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan.	Menggunakan pengadaan alat pertahanan sebagai variabel independen.	Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode kuantitatif <i>path analysis method</i> dengan variabel dependen ancaman non militer.
2.	Lobont, Oana Ramona <i>et.al.</i> (2019). "Correlation of Military Expenditures and Economic Growth:	Uji Granger Causality	Terdapat hubungan dua arah antara pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dengan efek positif. Dari segi ekonomi, hasil ini menyoroti	Menggunakan variabel anggaran pertahanan (militer) sebagai variabel independen.	Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode kuantitatif <i>path analysis method</i> dengan variabel independen melalui dimensi program pembinaan SDM dan program kesejahteraan prajurit dimaksudkan untuk

	<i>Lessons for Romania</i> ".		dampak pengeluaran militer dalam upaya penggunaan sumber daya yang efisien dalam perekonomian sektor, di tingkat nasional yang pada akhirnya dapat memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.		mempengaruhi ancaman non militer melalui variabel intervening tugas TNI.
3.	Wijayanto, Boby. (2019). "Pengaruh Modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan Batalyon Bekang Terhadap Kesiapan Dukungan Logistik Tentara Nasional Indonesia Angkatan	Uji regresi linear berganda menggunakan SPSS (<i>Statistical Package for Social Sciences</i>).	Modernisasi alutsista Batalyon Bekang berpengaruh positif terhadap logistik, sehingga dapat mendukung kesiapan operasional pasukan pengamanan di perbatasan yang dilaksanakan oleh TNI AD.	Modernisasi alutsista sebagai variabel independen merupakan bagian dari rencana dan strategi dalam pengadaan alat pertahanan	Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode kuantitatif <i>path analysis method</i> dengan variabel dependen ancaman non militer. Sedangkan penelitian Wijayanto menggunakan kesiapan dukungan logistik TNI AD sebagai variabel dependen.

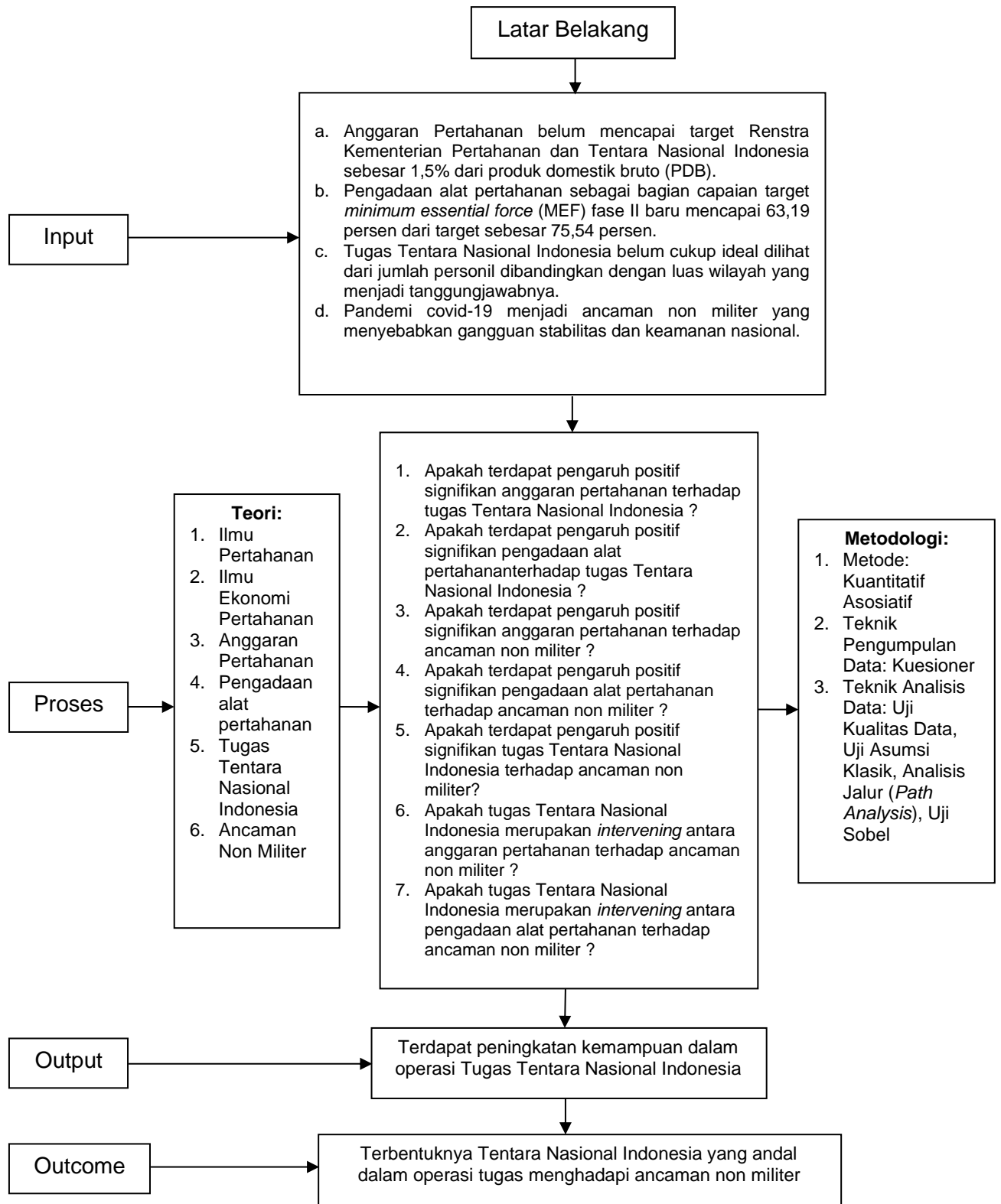
	Darat”.				
4	Nayar, Dian Shintani, <i>et al.</i> (2020). “Pengaruh Kemampuan Personel Dan Kelengkapan Alat Kerja Terhadap Kesiapan Satuan Pemeliharaan Pangkalan Dinas Fasilitas Dan Konstruksi Angkatan Udara di Jakarta”.	Kuantitatif asosiatif kausalitas dengan desain penelitian <i>cross sectional survei</i> menggunakan kuesioner dengan skala Likert.	Kemampuan personel dan kelengkapan alat kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kesiapan Satharlan Disfaskonau. Secara simultan kemampuan personel dan kelengkapan alat kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesiapan Satharlan Disfaskonau.	Menggunakan kuesioner dalam memperoleh data responden.	Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode kuantitatif <i>path analysis method</i> dengan kemampuan personel (tugas TNI) sebagai variabel intervening. Sedangkan penelitian Nayar menggunakan kemampuan personil sebagai variabel independen.
5.	Agustiana, Layli Eksak. (2020). “Pengaruh Wabah Covid-19 Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Sektor	Uji regresi linear berganda terhadap data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik.	Krisis ekonomi 1997-1998, 2008-2009, dan pada tahun 2020 ini akibat covid-19 berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka.	Menggunakan pengangguran sebagai dimensi variabel dependenancaman non militer.	Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode kuantitatif <i>path analysis method</i> .

	Terdampak Di Indonesia”.				
6.	Rivai, Afif Maulana. (2021). “Pengaruh Anggaran Pertahanan, Impor Alutsista, Ekspor Alutsista, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi”.	Uji regresi linear berganda	Anggaran pertahanan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, impor alutsista berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ekspor alutsista tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Menggunakan variabel anggaran pertahanan sebagai variabel independen.	Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode kuantitatif <i>path analysis method</i> dengan variabel independen melalui dimensi program pembinaan SDM dan program kesejahteraan prajurit dimaksudkan untuk mempengaruhi ancaman non militer melalui variabel intervening tugas TNI.

Sumber : Diolah oleh Peneliti, (2021).

2.3 Kerangka Berpikir

Sejalan dengan tujuan dan kajian teori yang telah dipaparkan, maka selanjutnya akan diilustrasikan dalam kerangka konseptual mengenai hubungan antara anggaran pertahanan dan pengadaan alat pertahanan terhadap tugas Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman non militer sebagaimana gambar di bawah ini:

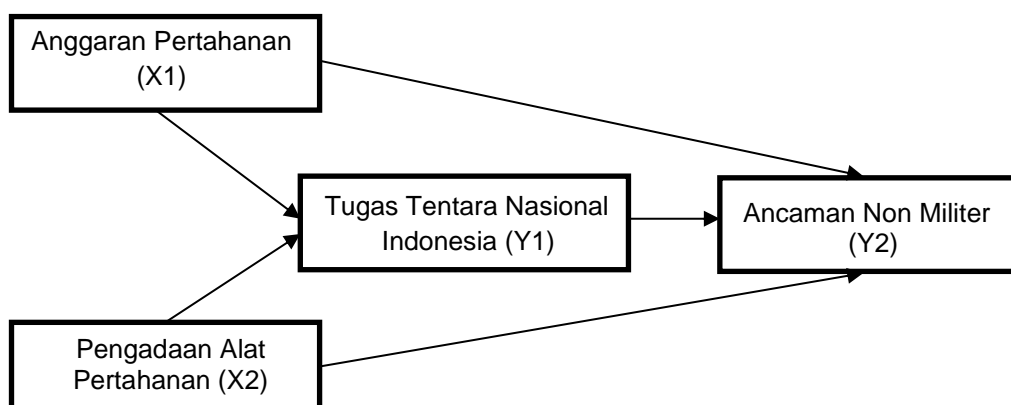


Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah Peneliti, (2021).

2.4 Model Analisis

Model analisis digunakan untuk penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik dalam analisis datanya, baik menggunakan variabel terukur maupun variabel laten. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian pada poin sebelumnya, maka model analisis pada penelitian ini adalah:



Gambar 2.2 Model Analisis Jalur

Sumber: Diolah Peneliti, (2021).

Berdasarkan gambar 2.2 tentang model analisis jalur, maka diketahui dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, diantaranya:

- a. Variabel Independen (Eksogenus)
Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya variabel dependen. Pada penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah Anggaran Pertahanan dan Pengadaan Alat Pertahanan.
- b. Variabel Dependen (Endogenus)
Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat adanya variabel bebas. Pada penelitian ini yang merupakan variabel dependen adalah Tugas Tentara Nasional Indonesia dan Ancaman Non Militer.

c. Variabel *Intervening*

Variabel *intervening* merupakan variabel antara atau mediasi yang digunakan untuk memediasi antara hubungan variabel independen dan dependen. Pada penelitian ini, variabel *intervening* adalah Tugas Tentara Nasional Indonesia sebagai mediator terhadap Ancaman Non Militer.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari Bahasa Sansakerta yang terdiri dari “*hypo*” yang berarti kurang dan “*thesis*” yang berarti pendapat. Ada juga yang mengatakan hipotesis adalah pendapat yang baru setengah benar. Sehingga jika didefinisikan, maka hipotesis adalah pendapat atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang diajukan, dimana kebenarannya perlu dibuktikan. (Tanjung dan Devi, 2013). Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh positif signifikan anggaran pertahanan terhadap tugas Tentara Nasional Indonesia.
- H2 : Terdapat pengaruh positif signifikan pengadaan alat pertahanan terhadap tugas Tentara Nasional Indonesia.
- H3 : Terdapat pengaruh positif signifikan anggaran pertahanan terhadap ancaman non militer.
- H4 : Terdapat pengaruh positif signifikan pengadaan alat pertahanan terhadap ancaman non militer.
- H5 : Terdapat pengaruh positif signifikan tugas Tentara Nasional Indonesia terhadap ancaman non militer.
- H6 : Tugas Tentara Nasional Indonesia merupakan *intervening* antara anggaran pertahanan dalam menghadapi ancaman non militer
- H7 : Tugas Tentara Nasional Indonesia merupakan *intervening* antara pengadaan alat pertahanan dalam menghadapi ancaman non militer